KONSEP HUKUM TATA RUANG DALAM PEMIKIRAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Desy Fithri Nur Rahmawati *¹

¹ Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*e-mail: c100200349@student.ums.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengulas tentang hukum tata ruang dalam perspektif pemikiran hukum. Melalui analisis dan sintesis berbagai sumber literatur, penulis membahas konsep dasar hukum tata ruang, peran dan tujuan hukum tata ruang, serta relevansinya dalam konteks pemikiran hukum. Artikel ini juga menjelaskan mengenai isu-isu yang muncul dalam pelaksanaan hukum tata ruang dan bagaimana pemikiran hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan solutif terhadap permasalahan tersebut. Dalam konteks ini, penulis menyoroti pentingnya mempertimbangkan prinsip keadilan, keberlanjutan, partisipasi publik, dan perlindungan lingkungan dalam pembentukan dan implementasi kebijakan hukum tata ruang. Diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran dan kontribusi pemikiran hukum dalam konteks hukum tata ruang.

Kata kunci: Tata Ruang, Hukum, Komprehensif

Abstract

This article discusses spatial law in the perspective of legal thinking. Through analysis and synthesis of various literature sources, the author explores the fundamental concepts of spatial law, the role and objectives of spatial law, and its relevance in the context of legal thinking. The article also explains the issues that arise in the implementation of spatial law and how legal thinking can provide a more comprehensive and solution-oriented understanding of these problems. In this context, the author highlights the importance of considering principles of justice, sustainability, public participation, and environmental protection in the formulation and implementation of spatial law policies. It is hoped that this article will provide a deeper insight into the role and contribution of legal thinking in the context of spatial law.

Keywords: Spatial Planning, Law, Comprehensive.

PENDAHULUAN

Hukum tata ruang merupakan bidang hukum yang memiliki peran sentral dalam mengatur tata cara penggunaan dan pengelolaan ruang dalam suatu wilayah. Dalam konteks yang semakin kompleks dan dinamis, pemahaman tentang hukum tata ruang dari perspektif pemikiran hukum menjadi semakin penting. Pemikiran hukum melibatkan analisis mendalam terhadap norma, prinsip, dan tujuan hukum yang menjadi dasar bagi pengaturan tata ruang. Pemikiran hukum dalam hukum tata ruang melampaui aspek teknis dan administratif, melibatkan refleksi kritis terhadap nilai-nilai yang mendasari pengaturan ruang. Melalui pemikiran hukum, kita dapat memahami hukum tata ruang sebagai alat yang mampu mewujudkan keadilan sosial, keseimbangan lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan.

Menyertakan prinsip pemberdayaan sebagai bagian integral dari usaha memperkuat keberadaan individu, keluarga, komunitas, negara, pemerintahan, dan dunia secara keseluruhan dalam konteks mewujudkan perkembangan manusia yang adil dan bermartabat. Hal ini dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan sektor lainnya. (Moh. Indra Bangsawan, Prof. Dr. Absori, 2019). Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi hukum tata ruang dari perspektif pemikiran hukum. Pertama, kita akan membahas konsep dasar hukum tata ruang dan kerangka hukum yang mengaturnya. Hal ini meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan instrumen hukum yang terkait dengan tata ruang. Kemudian, kita akan menyoroti peran dan tujuan hukum tata ruang dalam konteks pemikiran hukum. Hukum tata ruang diarahkan untuk mencapai keadilan distributif, mengatur pemanfaatan ruang secara efisien, serta memastikan keberlanjutan ekologis dan sosial dalam pembangunan wilayah.

Pemikiran hukum mencakup sejumlah konsep dan teori yang membentuk dasar filosofi hukum sebuah masyarakat. Pertama-tama, hukum adalah suatu sistem norma atau aturan yang mengatur perilaku manusia dalam suatu komunitas. Pemikiran hukum sering kali muncul dari filosofi moral dan etika, karena norma hukum sering kali mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Beberapa teori hukum, seperti positivisme hukum, menyatakan bahwa hukum harus dilihat secara terpisah dari pertimbangan moral, sementara teori naturalis berpendapat bahwa ada keterkaitan intrinsik antara hukum dan moral. Selain itu, pemikiran hukum juga melibatkan analisis tentang bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan diinterpretasi. Proses legislasi, yudisial, dan administratif merupakan aspek penting dalam pemikiran hukum. Para ahli hukum sering mempertimbangkan bagaimana hukum dapat menciptakan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara umum. Pemikiran hukum tidak hanya berkaitan dengan hukum yang tertulis, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Konsep hukum yang adil dan berkeadilan menjadi pusat perhatian dalam pembentukan sistem hukum. Pemikiran hukum juga mencakup pertimbangan terhadap bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan nilai-nilai masyarakat. Sejalan dengan itu, pemikiran hukum sering kali mencerminkan perdebatan tentang sumber-sumber hukum.

Apakah hukum berasal dari kodifikasi tertulis, kebiasaan, atau preseden hukum? Pertanyaan ini menjadi esensial dalam memahami asal-usul dan kewenangan hukum. Selain itu, pemikiran hukum mencakup konsep-konsep seperti kepastian hukum, yang menekankan perlunya hukum yang jelas dan dapat diantisipasi oleh masyarakat. Akhirnya, pemikiran hukum tidak hanya merupakan domain para ahli hukum, tetapi juga menjadi wacana masyarakat yang lebih luas. Partisipasi publik dalam membentuk dan mengkritik hukum adalah bagian integral dari pemikiran hukum demokratis. Oleh karena itu, pemikiran hukum mencerminkan dinamika yang terus berkembang dalam upaya mencapai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat

Selanjutnya, artikel ini akan membahas isu-isu yang sering timbul dalam pelaksanaan hukum tata ruang dan bagaimana pemikiran hukum dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif terhadap permasalahan tersebut. Isu-isu tersebut mungkin termasuk konflik kepentingan, ketimpangan akses terhadap ruang, tantangan teknologi, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tentang tata ruang. Dalam konteks pemikiran hukum, penting untuk mempertimbangkan prinsip keadilan, keberlanjutan, partisipasi publik, dan perlindungan lingkungan dalam pengaturan tata ruang. Prinsip-prinsip ini melibatkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan lingkungan, serta mengakui hak-hak yang sama dan perlindungan terhadap generasi sekarang dan masa depan.

Dengan menjelajahi hukum tata ruang dari perspektif pemikiran hukum, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan kontribusi pemikiran hukum dalam mengembangkan kebijakan tata ruang yang adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif yang dapat digunakan untuk meneliti artikel "Hukum Tata Ruang dalam Perspektif Pemikiran Hukum" adalah studi kasus. Penelitian ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap artikel tersebut dengan fokus pada memahami dan menginterpretasikan perspektif hukum yang terkait dengan tata ruang. Pertama, peneliti akan membaca dan menganalisis artikel tersebut untuk memahami argumen, pendekatan, dan teori hukum yang digunakan dalam konteks tata ruang. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis pernyataan, data, atau contoh yang digunakan dalam artikel untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pemikiran hukum diterapkan dalam konteks tata ruang. Metode ini akan memberikan wawasan mendalam tentang pemikiran hukum yang relevan dengan tata ruang, serta memberikan pemahaman tentang argumen dan pendekatan yang digunakan oleh penulis artikel tersebut.

Penelitian kualitatif ini juga dapat melibatkan analisis konseptual. Peneliti akan menganalisis konsep-konsep hukum yang diungkapkan dalam artikel, serta membandingkan dan menghubungkannya dengan literatur dan sumber-sumber hukum lainnya. Dalam analisis ini, peneliti akan mencoba untuk memahami implikasi dan dampak dari pemikiran hukum yang dibahas dalam artikel terhadap tata ruang. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, atau kontradiksi antara perspektif hukum dalam artikel tersebut dengan pandangan hukum yang telah ada sebelumnya. Metode ini akan memungkinkan peneliti untuk membangun argumen yang koheren dan kritis terhadap artikel, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi pemikiran hukum terhadap bidang tata ruang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Pemikiran Hukum dalam Hukum Tata Ruang

Pandangan pemikiran hukum dalam hukum tata ruang memiliki dimensi yang luas dan kompleks. Pertama-tama, hukum tata ruang dapat dipandang sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan spasial. Dalam perspektif ini, hukum tata ruang berperan dalam mengatur distribusi sumber daya dan fasilitas secara adil di suatu wilayah. Pemikiran ini mencerminkan keinginan untuk mengurangi disparitas antar wilayah, memastikan akses yang setara terhadap fasilitas umum, dan mendukung perkembangan yang merata.

Pandangan pemikiran hukum dalam hukum tata ruang sering kali menekankan perlunya pembangunan berkelanjutan. Hukum tata ruang berusaha untuk mengatur penggunaan lahan dan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekologi dan lingkungan. Pemikiran ini menciptakan dasar untuk pembentukan kebijakan yang mendukung pelestarian alam dan pemanfaatan lahan yang ramah lingkungan, menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Dalam pandangan pemikiran hukum, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam proses perencanaan tata ruang. Pemikiran ini menekankan perlunya melibatkan warga dalam pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan lahan dan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dianggap sebagai cara untuk memahami kebutuhan lokal, mencegah konflik kepentingan, dan menciptakan kebijakan yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Pandangan pemikiran hukum dalam hukum tata ruang mencakup aspek penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Pemikiran ini menyoroti pentingnya sistem penegakan hukum yang efektif, transparan, dan adil dalam menerapkan aturan-aturan tata ruang. Dengan demikian, hukum tata ruang bukan hanya menjadi seperangkat peraturan, tetapi juga menciptakan mekanisme penegakan yang dapat menjamin kepatuhan dan tanggung jawab pihak terkait.

Pandangan pemikiran hukum dalam hukum tata ruang mencerminkan kebutuhan untuk adaptabilitas dan responsivitas terhadap perubahan. Dalam era dinamika dan kompleksitas perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, hukum tata ruang perlu dapat beradaptasi dan merespons tantangan yang muncul. Pemikiran ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam perumusan kebijakan tata ruang untuk menjawab kebutuhan yang terus berkembang dalam masyarakat. Umumnya pandangan ini sama dengan pandangan hukum dalam mengatur hubungan sosialnya antara satu dengan yang lainnya (Teguh, 202, sehingga konsep hukum baik hukum tata ruang maupun hukum lain dapat berjalan dengan baik.

Pengertian Hukum Tata Ruang

Hukum tata ruang adalah cabang hukum yang mengatur pengaturan, penggunaan, dan pengembangan wilayah atau ruang fisik suatu negara atau daerah. Hal ini melibatkan perencanaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap penggunaan lahan, pembangunan, zonasi, perlindungan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks tata ruang. Tujuan hukum tata ruang adalah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, efisien, dan adil dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang fisik, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hukum tata ruang biasanya mencakup peraturan dan kebijakan terkait perencanaan wilayah, izin pembangunan, perlindungan lingkungan, pembebasan lahan, dan penataan ruang secara umum. Juga mencakup mengenai pengawasan dalam bidang pembangunan dan lingkungan hidup atau yang umumnya disingkat dengan PPLH (Wahid, 2016).

Hukum tata ruang ini hadir untuk menjadi pencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup atas pembangunan (Sood, 2021)

Dalam beberapa tahun terakhir, bidang ilmu sosial telah semakin memperhatikan analisis mengenai ruang dan bagaimana ruang tersebut mempengaruhi kehidupan sosial. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah analisis ruang dalam memahami interaksi sosial, ekonomi, dan kekuasaan (Victor, 2021). Dalam studi hukum, pendekatan pengaturan tata ruang juga telah mengalami perkembangan dengan pendekatan interdisipliner yang memeriksa peran hukum dalam konteks perkotaan. Pendekatan ini dikenal sebagai geografi hukum atau legal geography. Sebenarnya, istilah "geografi hukum" telah digunakan sejak tahun 1920-an oleh ahli hukum Jerman. Merk menggunakan istilah Rechtsgeographie, sementara Langhans-Ratzeburg menggunakan istilah Geojurisprudenz.

Pemikiran Hukum Tata Ruang di Indonesia

Pemikiran hukum tentang hukum tata ruang di Indonesia mencakup berbagai aspek yang relevan dengan pengaturan ruang fisik di negara ini. Beberapa pemikiran hukum yang umumnya dibahas dalam konteks hukum tata ruang di Indonesia meliputi (Ahmad Jazuli, 2017):

1. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan: Pemikiran ini menekankan pentingnya pengaturan tata ruang yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Prinsip ini mengarahkan hukum tata ruang untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
2. Partisipasi Masyarakat: Pemikiran ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait tata ruang. Pemikiran ini memandang partisipasi publik sebagai aspek krusial dalam memastikan pengaturan tata ruang yang adil, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pemikiran ini menekankan pentingnya memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengaturan tata ruang. Dalam konteks Indonesia, pemikiran ini terkait dengan penerapan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dalam pengambilan keputusan tata ruang yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah.
4. Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat: Pemikiran ini mengakui hak-hak masyarakat adat terkait dengan tata ruang dan sumber daya alam di wilayah mereka. Pemikiran ini memandang pentingnya mengakomodasi dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam pengaturan tata ruang, serta menghormati pengetahuan dan sistem nilai mereka terkait dengan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam.
5. Penegakan Hukum dan Sanksi: Pemikiran ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam pengaturan tata ruang. Pemikiran ini menggarisbawahi perlunya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran terhadap peraturan tata ruang, guna memastikan kepatuhan dan keadilan dalam penggunaan ruang fisik.

Pemikiran-pemikiran ini tercermin dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya. Pemikiran ini juga diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pengaturan tata ruang yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, partisipatif, dan berkeadilan dalam konteks Indonesia.

Penegakan Hukum dalam Tata Ruang Indonesia

Penegakan hukum dalam tata ruang merupakan aspek penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan pengaturan ruang fisik. Dalam konteks penegakan hukum tata ruang di Indonesia, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pentingnya keberadaan regulasi yang jelas dan tegas terkait dengan tata ruang, termasuk peraturan perencanaan wilayah, izin pembangunan, dan perlindungan lingkungan. Regulasi ini haruslah

didukung oleh sanksi yang memadai untuk melindungi kepentingan publik dan mendorong kepatuhan terhadap aturan-aturan tersebut (Muhar Junef, 2016).

Selanjutnya, penegakan hukum dalam tata ruang melibatkan peran berbagai lembaga dan stakeholder terkait. Lembaga-lembaga seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah daerah memegang peranan penting dalam melakukan pengawasan, inspeksi, dan penindakan terhadap pelanggaran terkait tata ruang. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum tata ruang di wilayahnya, termasuk memberlakukan sanksi administratif, mengawasi izin pembangunan, dan melakukan pemulihan lingkungan (Ir. H. Juniarso Ridwan, M.Si., M.H., Achmad Sodik, S.H., M.H, 2016).

Selain itu, partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam penegakan hukum tata ruang. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan pelanggaran terkait tata ruang dan berperan dalam pengawasan terhadap penggunaan lahan dan pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan tata ruang.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum tata ruang di Indonesia meliputi terbatasnya kapasitas institusi terkait, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, korupsi, dan peran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata dalam memperkuat sistem penegakan hukum tata ruang, termasuk peningkatan kapasitas institusi, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran terkait tata ruang. Secara keseluruhan, penegakan hukum dalam tata ruang memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan, keadilan, dan ketertiban dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang fisik. Upaya kolaboratif antara lembaga-lembaga terkait, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam memastikan penegakan hukum yang efektif dan meminimalkan pelanggaran terkait tata ruang.

Pemahaman masyarakat dalam hukum tata ruang dapat melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah masyarakat perlu mengetahui tujuan dari hukum tata ruang yang diimplementasikan kepada kehidupan bermasyarakat dan sosial. Sehingga pengetahuan ini yang kemudian mendorong masyarakat untuk tumbuh perasaan ingin mempelajari hukum tata ruang timbul, maka kemudian pemerintah berperan untuk menghadirkan fasilitas yang mendukung. Atas ketertarikan ini masyarakat dapat memasuki tahap selanjutnya yaitu perasaan terdorong untuk persoalan penataan ruang, setelahnya baru masyarakat akan merasakan dan memahami kepentingan mengenai penataan ruang itu. Maka dalam hal ini akan timbul perubahan termasuk di dalamnya sikap tanggung jawab masyarakat yang muncul akibat perasaan dan pemahaman mengenai penataan ruang. Hal ini yang kemudian mempengaruhi kapasitas penataan ruang pada suatu daerah, artinya partisipasi masyarakat berdampak besar terhadap penataan ruang (sarosa, 2021).

Tantangan penegakan hukum tata ruang di Indonesia

Penegakan hukum tata ruang di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Pertama-tama, ketidakselarasan antara regulasi pusat dan daerah seringkali menyulitkan pelaksanaan aturan tata ruang. Meskipun sudah ada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tetapi implementasinya di tingkat daerah belum selalu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kondisi ini dapat menciptakan disparitas antar wilayah dalam penerapan tata ruang, memicu konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Adanya praktik-praktik ilegal seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme turut merintangai penegakan hukum tata ruang. Beberapa proyek pembangunan seringkali mendapatkan izin secara tidak sah atau melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan. Peran birokrasi dan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik-praktik tersebut menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum tata ruang.

Korupsi memiliki dampak serius terhadap penegakan hukum tata ruang di Indonesia, dan fenomena ini menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya menciptakan tata ruang yang berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertama-tama, korupsi dapat mempengaruhi proses perizinan dan penataan ruang, di mana pejabat yang terlibat dapat

menerima suap atau gratifikasi untuk memberikan izin kepada proyek-proyek pembangunan yang seharusnya tidak memenuhi standar tata ruang. Praktik ini merugikan masyarakat karena dapat mengakibatkan alih fungsi lahan yang tidak terkontrol dan bertentangan dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan. Selain itu, korupsi juga dapat menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya, di mana keputusan penataan ruang yang seharusnya berdasarkan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang terlibat dalam praktek korupsi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam pemanfaatan lahan dan penyalahgunaan kebijakan tata ruang untuk kepentingan pribadi atau korporat. Korupsi juga dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam korupsi mungkin enggan atau tidak mampu secara efektif menindak pelanggaran tata ruang karena terlibat dalam jaringan korupsi yang melibatkan pemodal proyek atau pihak-pihak terkait. Hal ini dapat melemahkan sistem penegakan hukum tata ruang dan memberikan impunitas kepada pelaku pelanggaran. Korupsi juga dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tata ruang. Ketidakpercayaan ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan melaporkan pelanggaran tata ruang. Dengan demikian, korupsi tidak hanya merugikan secara langsung dalam proses penataan ruang, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana masyarakat kurang percaya dan enggan berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan tata ruang. Korupsi dapat menghambat pembangunan berkelanjutan dengan mengarahkan investasi pada proyek-proyek yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tata ruang yang baik. Pemilihan proyek berdasarkan kepentingan finansial pribadi para pejabat terlibat dalam korupsi dapat mengabaikan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan tata ruang. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan penegakan hukum tata ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia termasuk dalam sektor perekonomiannya (Ridwan, 2013).

Tantangan selanjutnya terletak pada minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengaturan tata ruang. Sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memahami dampak dari pelanggaran tata ruang terhadap lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Edukasi publik yang kurang dapat memicu minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Perubahan iklim dan bencana alam semakin menjadi ancaman serius terhadap tata ruang di Indonesia. Alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, deforestasi, dan pemanasan global dapat memicu bencana alam yang merugikan, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Penegakan hukum tata ruang harus dapat mengintegrasikan aspek keberlanjutan dan mitigasi risiko bencana dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Terakhir, perlu diperhatikan bahwa kapasitas lembaga penegak hukum dan kebijakan perlu ditingkatkan agar mampu mengatasi kompleksitas dan dinamika dalam penegakan hukum tata ruang. Pelatihan yang lebih intensif, penguatan koordinasi antarlembaga, serta penggunaan teknologi informasi yang canggih dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan efisiensi penegakan hukum tata ruang di Indonesia.

Dampak dan Implikasi Pengaturan Tata Ruang di Indonesia

Pengaturan tata ruang di Indonesia saat ini memiliki dampak dan implikasi yang signifikan. Pertama, dampaknya terlihat dalam pengendalian pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Melalui peraturan tata ruang, pemerintah dapat mengatur penggunaan lahan, zonasi, dan pola pembangunan yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini membantu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, pengaturan tata ruang juga memiliki implikasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Melalui zonasi dan penggunaan lahan yang teratur, pemerintah dapat melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Implikasi ini mencakup perlindungan hutan, lahan pertanian, dan kawasan konservasi yang penting bagi keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat.

Selain itu, pengaturan tata ruang juga berdampak pada pengurangan risiko bencana alam. Dengan mempertimbangkan faktor risiko dan karakteristik geografis dalam perencanaan tata ruang, pemerintah dapat mengurangi dampak bencana seperti banjir, longsor, atau gempa bumi. Penataan ruang yang baik juga dapat memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana dan meningkatkan upaya mitigasi serta penanggulangan bencana.

Terkait implikasi sosial, pengaturan tata ruang dapat mempengaruhi distribusi kegiatan ekonomi dan akses masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan publik. Perencanaan tata ruang yang inklusif dan partisipatif dapat memastikan pemerataan pembangunan, aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur penting lainnya (Utami, R, 2016).

Dalam keseluruhan, pengaturan tata ruang di Indonesia saat ini memiliki dampak yang luas dan implikasi yang penting terkait pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, pengurangan risiko bencana, dan pemerataan pembangunan. Upaya terus menerus dalam meningkatkan efektivitas pengaturan tata ruang menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan memastikan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan di masa depan.

Perspektif Hukum dalam Pandangan Penegakkan Hukum

Perspektif hukum dalam konteks penegakkan hukum melibatkan sejumlah prinsip dan pendekatan yang mendasari pelaksanaan kebijakan dan tindakan penegak hukum. Pertama-tama, hukum dipandang sebagai fondasi utama dalam menentukan tindakan penegakan hukum. Dalam perspektif ini, penegak hukum diharapkan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjalankan tugas mereka dengan itikad baik. Hal ini mencakup pemahaman mendalam terhadap norma hukum, prosedur pengadilan, dan hak asasi manusia, sehingga setiap tindakan penegakan hukum dapat berada dalam batas-batas legalitas. Pandangan hukum yang telah ada sebelumnya dalam konteks tata ruang meliputi aspek legal dari penataan ruang, yang mencakup perencanaan kota, desain perkotaan, perencanaan regional, perumahan dan permukiman, tata guna tanah, tata ruang air, dan lainnya. Hukum tata negara juga memiliki kaitan dengan penataan ruang, karena ruang lingkungannya mencakup seluruh organ negara, hak serta kewajiban, hubungan, serta tugas masing-masing dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Asas-asas hukum tata negara, seperti asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, dan asas pemisahan kekuasaan, juga berperan dalam penataan ruang. Dalam konteks Indonesia, penataan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang mengarah pada kebijakan dan rencana pemanfaatan ruang wilayah negara yang dapat dijadikan awal untuk perencanaan jangka panjang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) juga merupakan dokumen rencana tata ruang wilayah kota yang dikukuhkan oleh perda, dengan tujuan terselenggaranya pemanfaatan ruang yang teratur dan terpadu (Darmawati, Choirul Saleh, Imam Hanafi, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. RTRWN mengarah pada kebijakan dan rencana pemanfaatan ruang wilayah negara yang dapat dijadikan awal untuk perencanaan jangka panjang. Beberapa isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional antara lain (Suci Rahmadani, Misran Misran, 2018):

- RTRWN merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
- Ruang adalah wadah kehidupan dan kegiatan manusia yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara.
- RTRWN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam pemanfaatan ruang wilayah negara.
- RTRWN memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam jangka panjang.
- RTRWN memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam jangka menengah dan jangka pendek.

- RTRWN memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam rangka pembangunan nasional.
- RTRWN memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam rangka pengembangan wilayah.
- RTRWN memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
- RTRWN memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam rangka pengembangan kepariwisataan.
- RTRWN memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan.
- RTRWN memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam rangka pengembangan kawasan strategis nasional.
- RTRWN memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam rangka pengembangan kawasan andalan.
- RTRWN memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam rangka pengembangan kawasan perkotaan nasional.
- RTRWN memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam rangka pengembangan kawasan perdesaan.
- RTRWN memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam rangka pengembangan kawasan kepulauan.
- RTRWN memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam rangka pengembangan kawasan laut.
- RTRWN memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam rangka pengembangan kawasan rawan bencana.
- RTRWN memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam rangka pengembangan kawasan konservasi.
- RTRWN memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam rangka pengembangan kawasan pertambangan.
- RTRWN memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam rangka pengembangan kawasan energi.
- RTRWN memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam rangka pengembangan kawasan telekomunikasi.

KESIMPULAN

Pengaturan tata ruang di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam mengendalikan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, pengurangan risiko bencana, dan pemerataan pembangunan. Melalui peraturan tata ruang, pemerintah dapat mengatur penggunaan lahan dan zonasi yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Selain itu, pengaturan tata ruang juga berkontribusi dalam pengurangan dampak bencana dan peningkatan aksesibilitas fasilitas dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya terus menerus dalam meningkatkan efektivitas pengaturan tata ruang serta mengakomodasi pemikiran hukum yang mencakup aspek pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat, desentralisasi, perlindungan hak masyarakat adat, dan penegakan hukum yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jazuli. (2017). Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Recht Vinding*, Volume 6, No 2.
- Darmawati, Choirul Saleh, Imam Hanafi. (2015). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang, Vol. 4, No. 2.
- Ir. H. Juniarso Ridwan, M.Si., M.H., Achmad Sodik, S.H., M.H. (2016). *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.

- Moh. Indra and , Prof. Dr. Absori, S.H, M.Hum (2019) Kebijakan Sertifikasi Tanah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muhar Junef. (2016). Penegakan Hukum Dalam Rangka penataan ruang Guna mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4.
- Ridwan Zachrie, W. (2013). *Korupsi mengorupsi Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sarosa, W., Simanjuntak, H., & Hamdri, L. 2021. Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Penataan Ruang.
- Satupeta. (2022). Sekretarian Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (Online) (<https://satupeta.go.id/news-detail/56> diakses pada tanggal 12 Maret 2022).
- Sood, M. (2021). Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika.
- Suci Rahmadani, Misran Misran. (2018). Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan, Jurnal Ilmu Hukum dan Perundang-Undangan, Pranata Sosial Volume III, No.1.
- Sugardiman, Ruandha Agung dkk. (2018). Sinkronisasi Infromasi Geospasial Tematik Kehutanan Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Dengan Pendekatan Tipologi Kawasan Hutan, Seminar Nasional 2018: Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional, 187.
- Teguh, P., et. All. 2022. Hukum Dan Keadilan Bermartabat: Orientasi Pemikiran Filsafat, Teori Dan Praktik Hukum. 370.
- Utami, R. (2016). Tumpang Tindih (Overlapping) Penggunaan Tanah Antara Izin Usaha Pertambangan Dengan Hak Guna Usaha Perkebunan (Studi Kasus Di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan). Disertasi. Universitas Brawijaya.
- Victor Imanuel W. Nalle. (2021). Pendekatan Geografi Hukum Kritis Dalam Kajian Hukum Tata Ruang Indonesia: Sebuah Wacana Filsafat Hukum Dan Interdisiplin. Jurnal Hukum Justitia Et Pax, Vol. 37, No. 1.
- Wahid, A. Y., & SH, M. S. (2016). Pengantar Hukum Tata Ruang. Prenada Media